

BAB I

PENDAHULUAN

Di bab I penulis akan menyampaikan pendahuluan sebelum mengelaborasi lebih dalam tentang kebijakan luar negeri Turki. Bab I terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesa, serta Sistematika Penulisan. Dengan begitu pembaca akan mengetahui mengapa kebijakan luar negeri Turki pada masa pemerintahan AKP menjadi sangat menarik untuk dikaji.

A. Alasan Pemilihan Judul

Kemenangan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam pemilu di Turki sejak tahun 2002 merupakan fenomena sejarah yang patut dicatat. Sejak berdirinya Turki Modern yang digagas oleh Musthafa Kemal Attaturk tahun 1923, kursi-kursi birokrasi di Turki penuh dengan orang-orang liberal dan sekuler. Namun dengan kemenangan AKP dalam pemilu 2002, tampuk kekuasaan pun berada di tangan pemimpin-pemimpin yang lebih islami dan tidak lagi pro-Amerika. Sejak itu, banyak kebijakan-kebijakan luar negeri Turki yang berubah kiblat menghadap ke negara-negara yang seideologi dan masih satu budaya, yakni negara-negara di Timur Tengah.

Elastisitas kebijakan politik luar negeri Turki mendorong Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton untuk menyatakan bahwa Turki adalah kekuatan dunia yang sedang naik daun. Sebagian pengamat menyatakan bahwa keberhasilan politik luar negeri Turki ini berkat penasehat politik Erdogan, yaitu

Abdullah Gül yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri

Luar Negeri. Diplomasi Oglu sekarang berupaya mengkomparasikan antara realitas politik dan dan orisinalitas ideologi. Strategi politik luar negeri Turki ini bertumpu pada 2 pondasi utama, yang salah satu pondasinya adalah membersihkan dan mengkondusifkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan regional.¹

Strategi Intensif dan Politik Multidimensi yang dikembangkan oleh pemerintah Turki merupakan suatu gebrakan yang membuat kebijakan luar negeri Turki sangat menarik untuk diangkat. Dengan adanya Strategi intensif, maka Turki akan lebih mementingkan *national interest*-nya dibandingkan dengan kepentingan sekutu tradionalnya seperti Amerika Serikat, NATO, dan Israel. Sedangkan yang dimaksud dengan politik multidimensi adalah bahwasanya Turki harus mengembangkan hubungan luar negerinya yang yang tadinya hanya terbatas pada Kawasan Barat (Eropa Barat dan Amerika Serikat) menuju kawasan yang lebih luas dan beragam, terutama dengan negara-negara yang masih memiliki hubungan geopolitik, kebudayaan, dan sejarah dengan Turki.² Unik dan fenomenal, karena kebijakan ini bukanlah kebijakan luar negeri yang dicitakan oleh pendiri Turki Modern, Musthafa Kemal Attaturk. Hal inilah yang membuat penulis memilih untuk memfokuskan pembahasan pada peran AKP dalam perdamaian di Timur Tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Sejak pemerintahan Musthafa Kamal yang dijuluki sebagai Bapak Sekularisme Turki hingga tahun 1980-an, Turki selalu dikuasai oleh partai-partai sekuler yang ingin mempertahankan ide-ide sekularisme yang diusung oleh Musthafa Kamal. Apabila ada partai non sekuler yang berhasil menduduki puncak jabatan politik, maka hal itu tidak akan bertahan lama karena adanya protes dari rakyat sipil serta kudeta oleh militer yang ingin mempertahankan azas sekularisme di Turki.

Era pasca Perang Dunia, dan khususnya decade demokrat, adalah periode bergabungnya Turki ke dalam sistem kapitalis dunia, bukan saja di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik luar negeridan pertahanan. Pada tahun-tahun ini Turki menjadi bagian yang solid—sekalipun peripheral—dari struktur politik dan militer yang dibina oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk mempertahankan eksistensi demokrasi dan perdagangan bebas di Negara-negara mereka. Ini merupakan penyimpangan besar dari politik luar negeri Kemalis yang menekankan netralisme.³

Masuknya Turki ke dalam NATO dirayakan sebagai suatu keberhasilan besar di Turki, baik oleh orang-orang demokrat maupun oleh kelompok oposisi. Alasan mengapa Turki ingin sekali memasuki NATO adalah alasan yang rasional dan emosional. Secara rasional, keanggotaannya dipandang sebagai jaminan untuk menghadang invasi Soviet dan aliran bantuan sehingga bantuan serta pinjaman uang dari Barat yang akan memungkinkan modernisasi Turki. Secara emosional,

keanggotaannya dijadikan sebagai pertanda bahwa Turki akhirnya diakui sepenuhnya oleh negara-negara Barat sebagai negara yang sejajar dengan mereka. Perasaan ini tampaknya cukup meluas. Bahkan di tahun 1970-an orang mungkin masih bisa membeli "anggur NATO" di restoran-restoran Turki.⁴

Kemudian selanjutnya hubungan Turki terhadap negara-negara Timur Tengah menjadi semakin jauh. Hubungan Turki-Mesir tidak dapat diperbaiki lagi karena perbedaan pandangan, terutama dengan adanya Gamal Abdun Nasser yang menghembuskan nasionalisme sosialis Arab. Hubungan Syria-Turki pun memburuk hingga tahun 1957 Turki mengancam akan melintasi batas untuk menyerang Syria secara langsung. Turki pun sangat mendukung Amerika dengan mengizinkan Amerika mendirikan pangkalan-pangkalan militernya di Turki untuk mengintervensi perang saudara yang terjadi di Libanon.⁵

Namun sejak tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki berubah drastis. Konsep Strategic Depth dalam kebijakan luar negeri Turki mengacu pada karya Profesor Ahmet Davutoglu yang dipublikasikan pertama kalinya pada 2001. Strategic Depth adalah pendekatan politik luar negeri multi dimensional yang berpijak pada pemahaman atas akar sejarah dan posisi geostrategis Turki. Turki dianugerahi warisan sejarah kekhalfahan Dinasti Utsmaniyah gemilang dan posisi strategis karena memiliki selat Bosphorus yang menjadi jembatan Asia dan Eropa. Dari dua perspektif ini pula, Turki merumuskan peran dan kebijakan luar negerinya.

⁴Ibid. Hal. 309

⁵Ibid. Hal. 310-311

Pelan namun pasti, AKP sukses melakukan penguatan infrastruktur politik dan institusionalisasi demokrasi. Kesejahteraan rakyat pun meningkat dengan banyaknya lembaga-lembaga amal yang berada di bawah struktur AKP. Data dari *indexmundi.com* menyatakan bahwa pada tahun 2001 sebelum AKP berkuasa, GDP Turki hanya \$196,005,000,000 sedangkan setelah AKP berkuasa tahun 2011 GDP Turki meningkat drastis menjadi \$774,983,000,000. Turki dalam kekuasaan AKP juga berhasil meredam pemberontakan etnis Kurdi yang ingin memisahkan diri dari Turki. Selain itu, UU legalisasi jilbab di institusi pemerintahan juga telah berhasil disahkan tahun 2014 ini.

Berawal dari islamisasi perpolitikan dalam negeri, AKP memperluas aksinya dengan kebijakan luar negeri yang berbeda dari sebelumnya. Strategi dan kebijakan politik luar negeri AKP tidak terlepas dari pemikiran genial menteri luar negeri yang sekaligus akademisi kenamaan, Ahmed Davutoglu. Sebelumnya, kebijakan politik luar negeri Turki tidak pernah menjadi perhatian dunia atau setidaknya menjadi faktor penting dalam politik internasional. Kepentingan Turki secara tradisional hanya berfokus pada kebijakan mempertahankan stabilitas dan kondisi status quo di kawasan sekitarnya.⁶

Oleh karena itu, Turki dalam pemerintahan AKP bekerja keras membangun kepercayaan politik mereka melalui penguatan ikatan kultural dan keagamaandalam kebijakan politik luar negerinya. Untuk pertama kalinya, Turki

⁶ Ahmad Dzakin. *Kebangkitan Pos Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memerangkan Pemilyu* (Solo: Era Adicitra Intermedia 2012). Hal 151

mengambil sikap berlawanan dengan AS dalam Perang Irak Kedua di 2003. Turki tidak mengizinkan wilayah Turki sebagai fornt udara dalam menginvasi Irak. Turki sebaliknya menjalin hubungan erat dengan Iran dan Suriah yang dituduh pemerintah Bush sebagai kekuatan poros kejahatan (axis of evil). Selain itu, Turki memainkan peran positif sebagai mediator perdamaian Israel-Palestina dan Israel-Suriah.

Implikasi doktrin strategic depth di Timur Tengah terletak pada independensi dan keleluasaan Turki dalam memformulasi kepentingan dan kebijakan luar negerinya. Sesaat kemenangan Hamas dalam Pemilu Legislatif, Erdogan mengundang pemimpin Hamas, Khalid Meshal, ke Istanbul menawarkan peran mediasi Turki dalam konflik Israel-Palestina dan PLO-Hamas. Sebelum pecah Arab Spring, Turki memperbaiki hubungan dengan Suriah yang memburuk pada pemerintahan sebelumnya. Turki menolak upaya isolasi internasional yang dilakukan AS atas pemerintahan rezim Bashar Assad.⁷

Sikap dan pernyataan ini terus berkembang dan mengkristal dalam volume yang lebih besar, tepatnya ketika Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dari Istanbul menyatakan bahwa negaranya siap memainkan peran aktif untuk mencapai perdamaian antara Fatah dan Hamas, dua kelompok besar di Palestina.⁸ Selain itu, setelah Erdogan menduduki puncak kekuasaan tahun 2002, ia

⁷ibid. Hal 164-165

⁸Syarif Taghian. Op. Cit. Hal 331

menawarkan penyelesaian berbagai konflik kepada presiden Bashar Al-Assad melalui berbagai perundingan dan diplomasi.⁹

C. Rumusan Masalah

Sejak munculnya Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) sebagai pemenang pemilu sejak tahun 2002, kebijakan luar negeri Turki menjadi fenomenal di mata dunia internasional. Bukan hanya karena Turki yang bisa menduduki posisi strategis dalam kancah perpolitikan internasional, namun juga karena intervensi Turki dalam perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Maka dari itu, bisa diambil rumusan masalah atas tindakan AKP dalam kebijakan luar negeri Turki, *Bagaimanaperan AKP dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah?*

D. Jangkauan Penelitian

Dalam peneliatian kali ini, penulis membatasi penelitian pada era Turki Modern, yakni pasca keruntuhan dinasti Utsmaniyyah atau setelah dideklarasikannya Turki menjadi Republik Turki oleh Musthafa Kemal Attaturk sampai tahun 2014 ketika Erdogan terpilih menjadi presiden dengan pemilihan langsung oleh rakyat Turki pad bulan Agustus 2014.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Setiap upaya untuk memahami fenomena sosial pasti melibatkan upaya penyederhanaan atau simplifikasi fenomena itu. Penyederhanaan fenomena itu

dengan menggunakan konsep. Ilmuwan memilih konsep-konsep dan simbol-simbol untuk mengorganisasi persepsi mereka dan untuk membangun model yang dipakai menjelaskan berbagai peristiwa dalam masyarakat, termasuk Hubungan Internasional.¹⁰

Suatu konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu. Jadi, sebenarnya konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Maka dari itu, ada teori yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

Teori Pengaruh Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin:

Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu Negara dapat dipengaruhi oleh faktor politik domestik, faktor ekonomi dan militer domestik, serta faktor internasional. Namun di dalam tulisan ini penulis hanya akan mengelaborasi faktor politik domestik Turki, khususnya peran AKP dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki. Menurut Coplin, setidaknya dalam politik domestik suatu Negara, ada 4 hal yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu Negara:¹¹

1. Bureaucratic Influencer

Misalnya beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota

¹⁰Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1990). Hal. 38-39

birokrasi yang bertindak sebagai policy influencer kadang juga menjadi pengambil keputusan. Bureaucratic influencer memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya, bureaucratic influencer memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan

2. Partisan Influencer

Partisan Influencer adalah kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan pada penguasa dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam sistem demokrasi.

3. Interest Influencer

Yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan sama. Interest influencer memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga bureaucratic dan partisan

mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, interest influencer pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri

4. Mass Influencer

Mass Influencer terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri. Keempat tipe policy influencers itu tidak selalu memiliki pandangan sama terhadap suatu kebijakan. Perbedaan juga kerap dimiliki dengan para pengambil keputusan.

Dan dalam menganalisis peran AKP dalam kebijakan luar negeri

Turki, penulis akan mengambil 4 hal pula, yakni:

1. Bureaucratic Influencer
2. Partisan Influencer
3. Interest Influencer
4. Mass Influencer

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang penulis harapkan dari penelitian ini yakni:

1. Mengetahui kebijakan luar negeri Turki sebelum kemenangan AKP dalam pemilu 2002.
2. Mengetahui peran-peran serta tindakan AKP dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah setelah menjadi partai pemenang pemilu.
3. Menganalisis bagaimana peran AKP dalam mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk lebih condong kepada Timur Tengah.

G. Hipotesa

Dari rumusan masalah dan penjelesan teori beserta konsep di atas dapat disimpulkan sementara: Peran AKP dalam mempengaruhi politik luar negeri Turki melalui beberapa pengaruh, yakni:

1. Bureaucratic Influencer
2. Partisan Influencer
3. Interest Influencer
4. Mass Influencer

H. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi ini, penulis ingin mengkategorikan pembahasan dalam bab-bab yang berbeda. Di bab I penulis akan menyampaikan pendahuluan sebelum mengelaborasi lebih dalam tentang kebijakan luar negeri Turki. Bab I terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesa, serta Sistematika Penulisan. Dengan begitu pembaca akan mengetahui mengapa

Selanjutnya di bab II penulis akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Turki semenjak Turki resmi menjadi negara republik yang sekuler di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1923. Posisi geografis Turki yang berada di antara benua Asia dan Eropa menjadikan Turki sebagai jembatan dua budaya, Barat dan Timur. Namun saat itu Turki bukannya menjadi agen perdamaian, tetapi malah selalu berkonflik dengan negara-negara di Timur Tengah. Di bab ini penulis akan mengelaborasi lebih jauh tentang hubungan Turki dengan Palestina, Mesir, Syria, Libanon, dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang semakin memburuk karena perbedaan pandangan.

Di bab III penulis akan mengelaborasi peran-peran Turki di Timur Tengah setelah AKP berkuasa. Kebijakan Turki yang sekarang mulai condong kepada negara-negara Timur Tengah membuat Turki semakin berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di sana. Turki tidak lagi menjadi alat pelaksana kepentingan Barat, namun langsung menjadi agen perdamaian. Hal ini terbukti dengan penolakan Turki ketika Amerika Serikat hendak mendirikan pangkalan militer di Turki untuk menyerang Irak tahun 2003. Selain itu, Turki juga menjadi mediator dalam konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, antara lain konflik Hamas-Fatah dan Israel-Syria.

Di bab IV penulis akan menganalisis hal-hal yang menjadikan kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah berubah sejak tahun 2002. Penulis akan mengelaborasi peran AKP dalam perpolitikan domestik Turki sehingga bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki untuk berperan aktif dalam permasalahan di Timur Tengah

Selanjutnya di bab V yang berisi kesimpulan, penulis akan mengkonklusikan hal-hal berkenaan dengan kebijakan luar negeri Turki sejak menjadi negara sekuler hingga AKP memenangkan pemilu di tahun 2002. Penulis juga akan meringkas data-data tentang peran-peran AKP dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki di Timur Tengah dalam menghadapi peperangan gagasan dengan militer dan partai-partai sekuler di Turki